



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CICILIA ENI KURNIATI**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **209470**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.856.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/300 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21.17 m2/21.17 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
4. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 412.500.000
5. Tanah Seluas 1230 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 984.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **554.400.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.200.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI TRITON Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **57.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	120.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	219.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.807.100.000
III. HUTANG	Rp.	1.265.035.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.542.065.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.